

ABSTRAK

REKONSTRUKSI HUKUM ATAS INDIKATOR PEMBUKTIAN PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/Pdt.Sus-Hki/2024)

Sofyan Sauri 2410622034, Suherman, Iwan Erar Joesoef

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait dengan REKONSTRUKSI HUKUM ATAS INDIKATOR PEMBUKTIAN PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN di Indonesia dengan studi kasus atas inkonsistensi putusan pengadilan niaga dan putusan mahkamah agung, dengan fokus pada inkonsistensi putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Analisis dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, serta dibandingkan dengan sistem hukum Amerika Serikat dan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan pengadilan disebabkan oleh ketiadaan standar kualitatif mengenai genuine use serta mekanisme pembuktian yang tidak terstruktur. Selain itu, sistem penghapusan merek di Indonesia masih bersifat reaktif melalui litigasi, sehingga kurang efisien dan tidak efektif dalam mencegah praktik trademark hoarding. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui pembentukan standar kualitatif penggunaan merek.

Kata Kunci: Merek, Kualifikasi, Trips

ABSTRACT

LEGAL RECONSTRUCTION OF THE EVIDENTIARY CRITERIA FOR THE CANCELLATION OF UNUSED TRADEMARKS

(A Study Of Supreme Court Decisions No. 76 K/Pdt.Sus-Hki/2024)

Sofyan Sauri 2410622034, Suherman, Iwan Erar Joesoef

The objective of this research is to analyse the legal framework governing the cancellation of unused trademarks in Indonesia, using a case study of the inconsistencies between commercial court rulings and Supreme Court decisions, with a focus on the inconsistencies in the decisions of the Commercial Court and the Supreme Court in interpreting the provisions of Article 74 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This study employs a normative legal methodology, utilising a statutory approach, a case-based approach, a conceptual approach, and a comparative law approach. An analysis was conducted of the decisions of the Commercial Court and the Supreme Court, and these were compared with the legal system of the United States and China. The research findings indicate that inconsistencies in court rulings are caused by the absence of qualitative standards regarding genuine use and unstructured evidentiary mechanisms. Furthermore, the trademark cancellation system Indonesia remains reactive through litigation, making it inefficient and ineffective in preventing trademark hoarding. This contrasts with the United States, and China. Based on these findings, this study recommends legal reform through the establishment of qualitative standards for trademark use

Keyword: Trademark, Qualifications, Trips